

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokrasi adalah negara yang kekuatan sejatinya bukan berada di tangan negara atau dalam arti para elit pemerintahannya, tetapi terletak di tangan segenap warga negaranya. Sesuai dengan konsep demokrasi, “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka pemerintah harus mampu menempatkan rakyat sebagai komponen utama dalam pembuatan suatu kebijakan atau keputusan publik, yang berhubungan dengan kehidupan rakyat banyak. Karena pada dasarnya, rakyatlah pemerintah itu sendiri.

Di negara demokrasi, rakyat bebas untuk memilih, untuk memenuhi setiap kebutuhannya, bebas menentukan nasib sendiri, dan bebas untuk berkembang sesuai dengan kemungkinan dan potensi yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, tugas pokok negara demokrasi ialah mengembangkan segenap potensi yang terdapat pada setiap warga negaranya dalam suasana yang damai dan adil.

Dalam mewujudkan demokrasi, sangat diperlukan peranan politik untuk membentuk sikap dan pikiran demokrasi bagi kalangan warga negara sebagai sumber daya politik, agar tercapai suatu kreativitas atau partisipasi dalam politik. Tingginya tingkat pendidikan dan kebudayaan yang dianut suatu masyarakat akan menjadi barometer bagi pertumbuhan negara dan pemikiran tentang politik dari masyarakat, dan akan menjadi pengaruh dalam berkembangnya konsep demokrasi bagi negara bersangkutan. Sebab itulah

negara demokrasi, sangat berkepentingan dengan pendidikan seluruh warga negaranya demi menanamkan norma-norma demokrasi dan ikut bertanggung jawab atas diterapkannya asas demokrasi.

Sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut asas demokrasi yang bertanggung jawab. Di negara Indonesia, setiap warga negara bebas untuk berkumpul, berorganisasi, serta memberikan pendapatnya. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan dalam politik merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi dan peran masing-masing berbeda.

Sebagai salah satu infrastruktur politik, kelompok kepentingan adalah salah satu wadah bagi masyarakat untuk mewujudkan demokrasi. Pada dasarnya pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan kelompok kepentingan merupakan salah satu tempat atau wadah penerimaan hak bagi warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapatnya.

Melalui kelompok kepentingan, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk mengatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Kelompok kepentingan merupakan wadah dan komponen yang sangat penting dalam sistem politik yang demokrasi. Karena melalui wadah ini, masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan atau dibuat oleh para elit pemerintah.

Sejarah perkembangan dan peran kelompok kepentingan sangat berkaitan dengan partisipasi politik, yang merupakan aspek penting yang akan menunjukkan hubungan yang erat antara keberadaan warga masyarakat dengan proses-proses politik. Kelompok kepentingan mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa ada keinginan untuk memperoleh suatu jabatan publik. Keputusan-keputusan politik yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan setiap warga. Oleh karena itu, warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Fungsi utama kelompok kepentingan sebagai infrastruktur politik, ialah mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Selain itu, masih ada beberapa fungsi dari kelompok kepentingan. Gabriel Almond dalam Arifin (2002: 66) menyatakan bahwa: “Fungsi kelompok kepentingan adalah sebagai sarana untuk melakukan antara lain, sosialisasi politik dan rekrutmen, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta komunikasi politik”.

Setiap anggota masyarakat perlu dan harus punya cara hidup dan cara pikir sesuai dengan tatanan yang ada pada masyarakat, dan pada negara di mana individu itu menjadi warga negara. Maka masyarakat harus belajar untuk memahami dan menghayati tatanan itu. Apabila seseorang itu ingin belajar memahami dan menghayati tatanan yang berkaitan dengan politik, maka seseorang itu harus mengalami sosialisasi politik.

Herbert H. Hyman dalam Subiakto (2012: 57) mengatakan bahwa: “Sosialisasi Politik adalah proses belajar dari pengalaman warga masyarakat atau subkelompok, yang secara langsung relevan bagi stabilitas sistem politik dan yang kemudian menghasilkan keragaman dan bentuk-bentuk institusional dari pengawasan”.

Selanjutnya Graber dalam Subiakto (2012: 57) menyatakan bahwa: “Sosialisasi politik adalah sebagai proses ketika orang mempelajari struktur dan faktor lingkungan, sekaligus mempelajari dan menginternalisasi aturan-aturan dan perilaku mengenai kehidupan politik”. Jadi, sosialisasi mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dengan pemerintah.

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup. Berkembang melalui keluarga, sekolah, tempat kerja, organisasi massa, organisasi keagamaan, serta partai politik. Sosialisasi politik juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letak kelompok kepentingan dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya, dilakukan melalui berbagai cara, yaitu melalui media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya, apabila kelompok kepentingan dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingannya sendiri di bawah kepentingan

nasional, dan selalu memupuk identitas nasional dan integrasi nasional. Ini adalah tugas lain dalam kaitannya dengan sosialisasi politik.

Dalam hal ini, kelompok-kelompok kepentingan di Indonesia sangatlah berperan untuk melaksanakannya semaksimal mungkin. Khususnya pada organisasi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI). Sebagai salah satu kelompok kepentingan atau organisasi masa yang mendukung salah satu partai besar di negara Indonesia, yaitu partai politik Golongan Karya (GOLKAR), SOKSI mempunyai peran penting dalam melaksanakan sosialisasi politik, agar dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1960 oleh Mayor Inf, TNI-AD Suhardiman, dengan dilandasi keyakinan dan kesadaran yang mendalam akan keluhuran serta kebenaran cita-cita perjuangan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai pengamalan Pancasila.

Dalam buku Hasil Musyawarah Nasional IX Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI) Tahun 2010, Nomor: VI/MUNAS/SOKSI-IX/V/2010, SOKSI mempunyai visi dan misi. SOKSI diharapkan mempunyai peran dan pengaruh besar dalam berkembangnya dunia politik di Indonesia dan dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan kebijakan publik. SOKSI dapat menjalankan visi-misinya sesuai dengan fungsi-fungsi kelompok kepentingan sebagai salah satu infrastruktur politik. Khususnya dapat menjalankan perannya dalam melaksanakan sosialisasi politik. Karena hal inilah, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengangkat

judul **“Peran SOKSI Sebagai Kelompok Kepentingan dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik (Studi Kasus di Kantor Depidar II SOKSI Medan).**

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih jelas dan terarah, maka perlu dirumuskan ruang lingkup masalah yang sudah jelas, agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam. Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka Penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Fungsi-fungsi kelompok kepentingan sebagai salah satu infrastruktur politik.
2. Peran kelompok kepentingan dalam melaksanakan sosialisasi politik.
3. Bentuk-bentuk pelaksanaan sosialisasi politik.
4. Pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi politik dalam kelompok kepentingan.
5. Manfaat sosialisasi politik yang dilakukan oleh kelompok kepentingan.

C. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu ditegaskan pembatasan masalah yang akan diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Iskandar (2010: 165) yakni: “Pembatasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, khususnya waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan dengan penelitian, sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan lebih terfokus dan mendalam”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka untuk mempermudah penelitian, Penulis membatasi masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Peran SOKSI sebagai kelompok kepentingan dalam melaksanakan sosialisasi politik.
2. Manfaat sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh SOKSI sebagai kelompok kepentingan, terhadap masyarakat.

D. Perumusan Masalah

Di dalam penelitian perlu ditegaskan masalah yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Iskandar (2010: 243), yaitu: “Rumusan masalah merupakan uraian dari masalah-masalah yang dimunculkan dalam latar belakang sebelumnya, dan rumusan masalah sebaiknya dinyatakan dengan kalimat pertanyaan atau pernyataan”.

Jadi untuk menghindari timbulnya salah pengertian yang terlalu jauh terhadap masalah yang dibicarakan, maka Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran SOKSI sebagai kelompok kepentingan dalam melaksanakan sosialisasi politik?
2. Bagaimanakah manfaat sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh SOKSI sebagai kelompok kepentingan, terhadap masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan, yang akan menjadi arah dan sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui tentang peran SOKSI sebagai kelompok kepentingan dalam melaksanakan sosialisasi politik.
2. Untuk mengetahui mengenai manfaat sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh SOKSI sebagai kelompok kepentingan, terhadap masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, Penulis sangat mengharapkan dapat memberi manfaat, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu serta pengetahuan Penulis tentang bagaimana sebenarnya peran organisasi SOKSI sebagai kelompok kepentingan dalam melaksanakan sosialisasi politik.
2. Sebagai bahan masukan dan referensi untuk penulisan berikutnya kepada mahasiswa yang ingin mengangkat masalah tentang peran kelompok kepentingan.
3. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan fakultas dan perpustakaan umum UNIMED.
4. Sebagai bahan masukan bagi para pengurus (Depidar II) SOKSI Kota Medan.